

## PERANAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh  
Siti Hajar Audina

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dapat meningkatkan skill (kemampuan) pelaku UKM serta menghasilkan produktivitas secara efektif dan efisien. Adapun bentuk pengembangan yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM meliputi bidang perizinan, pembiayaan, pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi serta menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. Sektor Usaha Kecil dan Menengah mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahunnya, ini membuktikan banyaknya pelaku UKM yang mengikuti Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

**Kata Kunci :** Pelatihan, Pengembangan Pelaku UKM

### A. PENDAHULUAN

Dinas Koperasi dan UKM adalah lembaga pemerintahan yang bertugas dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Peran Dinas Koperasi dan UKM sangat diperlukan untuk perkembangan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan peran koperasi dan UKM dengan mewujudkan program pelatihan, pendidikan, dan dapat memberikan uji kelayakan pada produk yang di hasilkan.

Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan

pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor dan perluasan kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan, juga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Keberadaan usaha kecil dan menengah tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi secara nasional karena usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagai besar rakyat indonesia.

Mengingat banyaknya pengangguran dan tidak semua orang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan, maka keberadaan UKM ini dapat memberikan peluang yang besar untuk penyerapan

tenaga kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Masyarakat bisa saja mewujudkan dalam hal pengembangan UKM, dimana hal tersebut sangat penting untuk bisa mewujudkan perekonomian masyarakat yang baik. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mengembangkan UKM ditengah persaingan usaha yang semakin ketat. Bukan hanya persaingan di dalam negeri saja, tetapi pengembangan UKM juga bertujuan untuk dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri, Bahkan pada saat ini masing – masing daerah di Indonesia bergerak untuk mengembangkan UKM.

Keberadaan dari UKM ini bukan berarti tanpa masalah. Permasalahan UKM berkaitan dengan permodalan, pemasaran, serta pengelolaan yang kurang professional. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki UKM.

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dibutuhkan peran dari pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang yang berkewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan untuk menumbuh kembangkan UKM sehingga kedepannya menjadi usaha kecil yang produktif dan berkembang.

Koperasi pada intinya adalah pembentukan badan usaha yang bertujuan untuk menggalang modal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan anggota. Pembentukan badan usaha koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi para anggota, baik yang bersifat individual maupun kelompok. Koperasi yang sudah dibangun selama ini jumlahnya juga sudah cukup banyak.

Jumlah ini merupakan aset yang harus dipelihara dan diberdayakan agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Peranan Pelatihan Terhadap Pengembangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang”**.

## LANDASAN TEORI

### A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Deli serdang ?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Koperasi dalam upaya mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Deli Serdang ?

### B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

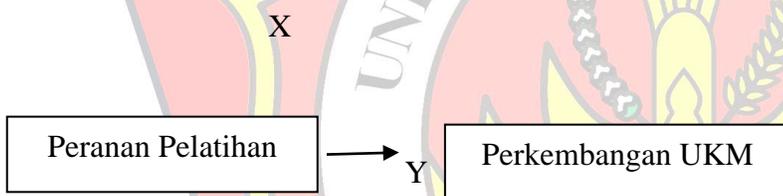
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan pada Dinas Koperasi Kabupaten Deli serdang terhadap Usaha Kecil dan Menengah.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Koperasi dalam upaya mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di daerah Kabupaten Deli Serdang.

### C. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep merupakan kemampuan seorang peneliti untuk menyusun konsep operasional peneliti yang bertitik tolak dengan kerangka teori dan tujuan dari penelitian. Dalam

penelitian, seorang peneliti harus mampu menggambarkan fenomena dari apa yang ditelitinya yang disusun dalam kerangka teori. Menurut Singarimbun (1995 : 17) kerangka konsep merupakan definisi yang dipakai untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena alami.

Berdasarkan kerangka teori yang telah disusun, variabel bebas (X) : Peran Pelatihan. Variabel terikat (Y) Pengembangan Pelaku UKM, dengan obyek penelitian pada Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang.



**1.2 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1) **Manfaat Teoritis**

Dapat menjadikan UKM sebagai salah satu kebijakan yang membawa dampak positif kepada masyarakat agar terciptanya kehidupan yang sejahtera.

2) **Manfaat Praktis**

a) **Bagi Peneliti**

Sebagai bahan perbandingan antara

teori koperasi usaha kecil dan menengah dengan kenyataan yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.

b) **Bagi Perusahaan**

Sebagai bahan masukan dalam hal pelaksanaan pelatihan terhadap upaya pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

c) **Bagi Masyarakat**

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan objek yang sama.

d) **Bagi Perguruan Tinggi**

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Dharmawangsa Medan.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Peranan Pelatihan**

Definisi peranan menurut Suhardono (1994:15) bahwa peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan.

Soejono Soekanto (1990:268)

Menurut Soeprihanto (2001) menyatakan

mengatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

bahwa pelatihan adalah kegiatan untuk memperbaiki kemampuan karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan dari keterampilan operasional dalam menjalankan suatu pekerjaan, dan dapat dikatakan juga bahwa pelatihan

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang yang penting bsgi struktur sosial masyarakat dan sesuai kedudukannya dalam suatu jabatan. Seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya berarti telah menjalankan suatu peran. Peranan biasa juga disandingkan dengan fungsi peran dan status yang tidak dapat dipisahkan, tidak ada peran tanpa kedudukan atas status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Peran lebih menunjukan pada fungsi penyesuaian diri sebagai proses.

Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat dan peran juga menentukan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

merupakan suatu proses pembinaan dan pengetahuan terhadap sekelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan kejujuran dan keterampilan operasional.

### 2.1.1 Tujuan Pelatihan

Hamalik (2007), Tujuan umum pelatihan adalah:

1. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional.
3. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan manajemen (pimpinan).

Adapun tujuan khusus pelatihan adalah:

1. Tujuan pelatihan induksi, yaitu untuk membantu pegawai menyelesaikan pekerjaannya yang baru dan untuk memberikan beberapa ide mengenai perusahaan dan latar belakang pekerjaannya.
2. Tujuan latihan kerja, yaitu untuk memberikan instruksi khusus guna melaksanakan tugas-tugas dari suatu jabatan tertentu.
3. Tujuan latihan pengawas, yaitu untuk memberikan pelajaran kepada pegawai tentang bagaimana memeriksa dan mengawasi serta melatih pegawai-pegawai lainnya.
4. Tujuan latihan manajemen, yaitu untuk memberikan latihan yang diperlukan dalam jabatan manajemen puncak (misal: Akuntan, Sekretaris, dll).

5. Tujuan latihan pengembangan pemimpin adalah untuk mengembangkan dan menambah kemampuan pemimpin-pemimpin yang sudah ada.

### 2.1.2 Unsur-unsur Pelatihan

Adapun unsur-unsur pelatihan yaitu:

1. Peserta latihan
  - Penetapan calon peserta latihan erat kaitannya dengan keberhasilan proses pelatihan yang nantinya turut menentukan efektifitas pekerjaan. Oleh karena itu perlu dilakukan seleksi yang diteliti untuk memperoleh peserta yang baik berdasarkan kriteria antara lain: jenjang pendidikan dan keahlian, jabatan, pengalaman kerja, motivasi dan minat, pribadi serta intelektual.
2. Pelatih (instruktur)
  - Pelatih memegang peran pennting terhadap kelancaran dan keberhasilan program pelatihan. Itu sebabnya perlu dipilih pelatih yang ahli, berkualifikasi dan profesional. Beberapa syarat sebagai

pertimbangan adalah: telah disiapkan secara khusus sebagai pelatih, ahli di bidang spesialisasi tertentu, berkepribadian baik, berasal dari lingkungan dalam organisasi (lebih baik dari pada berasal dari lingkungan luar organisasi).

Bentuk pelatihan yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan pegawai antara lain: belajar melalui observasi, kuliah, latihan, penyuluhan, kursus studi, seminar, pengajaran dengan mesin, permainan bisnis, rotasi jabatan, program pengembangan manajemen, dll.

3. Lamanya pelatihan

Lamanya masa pelatihan berdasarkan pertimbangan tentang: jumlah dan mutu kemampuan yang hendak dipelajari di pelatihan tersebut, kemampuan belajar peserta dalam pelatihan, serta media pengajaran.

Dengan adanya pelatihan serta di dukung dengan fasilitas pemasaran yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah diharapkan pengusaha kecil dapat mengembangkan usahanya, sehingga kedepannya mampu menciptakan hasil yang lebih baik dan mampu berkembang hingga pasaran lokal maupun ekspor.

4. Bahan latihan

Bahan latihan sebaiknya disiapkan secara tertulis agar mudah dipelajari peserta. Cara penulisannya agar disesuaikan dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku.

**2.2 Pengembangan UKM**

**2.2.1 Pengertian Pengembangan**

Moekijat, (1991) merumuskan bahwa pengembangan sebagai sesuatu perubahan dalam orang yang memungkinkan yang bersangkutan bekerja lebih efektif.

5. Bentuk pelatihan

Pengembangan memiliki setiap kegiatan yang

dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang terdiri dari pengetahuan, kecakapan dan sikap. Hasil pengembangan adalah: (1) Pegawai memiliki pengetahuan atau informasi baru, (2) Dapat menerapkan pengetahuan lama dengan cara baru, (3) mempunyai minat yang lebih besar untuk menerapkan apa yang ia ketahui. Arah pengembangan adalah mengembangkan karyawan sekarang dan mendatang untuk tugas-tugas masa depan dengan organisasi atau memecahkan masalah organisasi.

### 2.2.2 Pengertian UKM

M. tohar (2000:11) mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

#### a. Kelebihan Usaha Kecil Menengah

b. Adapun kelebihan usaha kecil menurut Tohar (2000:27) yaitu usaha kecil pada kenyataannya mampu bertahan

dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi maupun proteksi, usaha kecil mampu menambah nilai devisa Negara khususnya industri kecil disektor informal dan mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat kecil/lapisan bawah.

### Kelemahan Usaha Kecil Menengah

Kelemahan dan hambatan pengelolaan usaha kecil umumnya berkaitan dengan faktor internal dari usaha itu sendiri. Kelemahan dan hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Sumber modal yang terbatas kemampuan pemilik.
- Terlalu banyak biaya dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak mematuhi pembukuan standar.
- Pembagian kerja yang tidak proporsional dan karyawan sering bekerja diluar prosedur kesepakatan kerja.

- Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas.

- Persediaan barang tidak terlalu banyak sehingga beberapa barang kurang laku.

- Sering terjadi miss manajemen dan ketidak pedulian pengelola terhadap prinsip-prinsip manajerial.

- Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan.

Adapun yang menyangkut faktor eksternal antara lain sebagai berikut :

- Resiko dan utang-utang kepada pihak ketiga ditanggung oleh pribadi pemilik.
- Sering kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta dalam proporsi.

- Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar dan analisis pemutaran uang tunai.

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil dan menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Sedangkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel 2.2.2 Kriteria UMKM

No	Usaha	Kriteria Asset	Kriter
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks.
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Milia

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012

Secara umum, ada banyak UKM dengan kriteria yang berbeda. Berikut ini

beberapa di antaranya:

a) Manajemen Bisnis Sendiri

UKM sangat berbeda dengan waralaba. Perbedaannya yang mencolok terletak pada manajemen bisnis. Apabila waralaba memiliki manajemen bisnis yang ditentukan oleh pihak *franchisor* (pemberi waralaba/pendanaan), maka UKM tidak. Pemilik UKM memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan sendiri dengan kemajuan usahanya.

b) Modal Usaha Terbatas

UKM memiliki modal terbatas, karena pada umumnya modal hanya berasal dari pemilik usaha atau bisa jadi sekelompok kecil orang yang ikut menginvestasikan uangnya untuk modal UKM tersebut.

c) Karyawan Kebanyakan dari Penduduk Lokal

Pada umumnya, UKM mengambil karyawan dari penduduk lokal. Hal ini dikarenakan dua hal. Pertama, pemilik

UKM ingin memberdayakan penduduk lokal agar bisa bekerja secara mandiri di daerah tersebut. Kedua, adanya keterbatasan biaya untuk menggaji karyawan yang berasal dari daerah luar.

d) Bersifat Usaha Keluarga

Pada umumnya, UKM bersifat usaha keluarga. Dalam artian, usaha ini dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha bersama keluarganya. Setelah berkembang cukup besar, pemilik UKM mempekerjakan penduduk sekitar dengan sistem seperti keluarga.

e) Posisi Kunci Dipegang oleh Pemilik

Maju mundurnya UKM tergantung sepenuhnya oleh pemilik usaha. Dalam hal ini, berarti sistem untuk menjalankan atau memajukan usaha tidak diajarkan kepada karyawan atau orang yang menjadi kepercayaan.

f) Modal Usaha Berasal dari Keuangan Keluarga

Kebanyakan UKM tidak mengandalkan modal dari pihak luar, seperti

investor atau bank, tetapi dari keuangan keluarga, sehingga memungkinkan tercampurnya keuangan keluarga dan perusahaan. Modal dari pihak luar hanya dibutuhkan ketika pemilik UKM ingin mengembangkan usaha tersebut keluar daerah.

g) Menuntut Motivasi Tinggi

Untuk memajukan UKM, pemilik usaha dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi tersebut meliputi motivasi untuk melakukan promosi secara besar-besaran, membuat situs bisnis, membuat strategi marketing *online* serta *offline*, dan sebagainya.

h) Menggunakan Teknologi Sederhana dalam Proses produksi

Pada umumnya, UKM masih menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksinya. Teknologi sederhana yang dimaksud disini adalah alat-alat yang masih tradisional dan belum canggih, sebagaimana yang ada belakangan ini.

### 2.2.3 Program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi berperan terhadap UKM agar dapat mengurangi atau menghilangkan kelemahan serta meningkatkan potensi dan memanfaatkan peluangnya.

UKM yang berdaya adalah UKM yang memiliki kemampuan permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas terhadap investor, sumber bahan baku, memiliki daya saing yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- a) Meningkatkan akses ke perbankan/lembaga keuangan.
- b) Pemberdayaan melalui kemitraan.
- c) Meningkatkan ke mampuan kewirausahaan.

### 2.3 Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa inggris “*Coperation*” yang terdiri dari dua suku kata, *Co* berarti sama dan *Operation* yang berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama.

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi.

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.

### 2.3 Pembinaan

Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, uang, waktu, metode, dan sistem yang berdasarkan

pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil.
  - 2) Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil.
  - 3) Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
  - 4) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.
- Pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat berupa:

- a. Penyediaan tenaga konsultan profesional, sarana, prasarana, teknologi, dana dan informasi.
- b. Bimbingan dan konsultan.
- c. Pendidikan dan pelatihan.
- d. Advokasi.

e. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.

mengembangkannya.

Menurut Dewi, 2008 dalam Alhampi, Raden

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan pembinaan adalah “segala sesuatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna (Musanef, 1991:11).

(2013), kegiatan pembinaan tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi:

1. Ketersediaan dana
2. Jalinan kerjasama dengan instansi lain
3. Ketersediaan sarana dan prasarana

Sedangkan faktor penghambat pembinaan antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia
2. Ketidakmampuan pengusaha mengembalikan pinjaman
3. Keterbatasan jumlah pegawai
4. Keterbatasan informasi

Menurut Hidayat S (1979:10) pembinaan adalah suatu yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan, simulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan.

Tujuan pembinaan UKM selain yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 antara lain:

- Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- Meningkatkan akses terhadap sumber modal dan memperkuat struktur modal.
- Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen.

Alhampi, Raden (2013) pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan

- Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi.

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan, metode yang digunakan adalah:

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Observasi dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang. Observasi ini terkait dengan kebijakan perkembangan UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang yang merupakan produk kebijakan pemerintah. Observasi ini dilakukan mulai dari pengembangan UKM, pemberdayaan UKM, pembinaan UKM, dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan UKM.
2. Interview atau wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan informasi. Narasumber dalam wawancara ini adalah

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang serta pelaku UKM. Wawancara yang dilakukan tidak terikat pada pedoman pertanyaan tertentu, melainkan mengeksplorasi gagasan-gagasan Yang muncul selama proses wawancara.

Wawancara ini ditunjukan untuk menggali pemahaman efektifitas kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang.

3. Dokumentasi, yaitu studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti dan data yang diperoleh dilapangan. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan Kawasan Pemerintahan Deli serdang yang beralamat di Jalan Karya Utama No.4, Perbarakan, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20514.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data pada penelitian ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara kepada kelompok pelaku UKM yang mengikuti program pelatihan. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui jumlah pendapatan, tenaga kerja setelah dan sebelum mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap dari data primer, diperoleh melalui buku, instansi-instansi terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dan penelitian data ini akan dianalisa dengan menggambarkan keadaan objek berdasarkan data subyektif, sehingga data-data yang ada dapat disimpulkan setelah analisa. Adapun tahapan dalam menganalisa data adalah:

#### a) Reduksi Data

Pada tahapan ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya, data yang terpilih disederhanakan, dalam arti

mengklasifikasikan data atas dasar kasar tersebut menjadi uraian singkat.

#### b) Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Selanjutnya, hasil teks naratif tersebut diringkas kedalam bentuk bagan yang menggambarkan alur proses perubahan cultural. Masing-masing komponen dalam bagan merupakan abstraksi dari teks naratif data lapangan. Kemudian, peneliti menyajikan informasi hasil penelitian berdasarkan pada susunan yang telah diabstraksikan dalam bagian tersebut.

#### c) Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Disamping menyandarkan pada klarifikasi data, penelitian juga memfokuskan pada abstraksi data yang tertuang dalam bagan. Setiap data yang menunjang komponen bagan, diklarifikasi kembali: baik dengan informan dilapangan maupun melalui diskusi-diskusi dengan sejawat. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data, pengumpulan data untuk komponen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

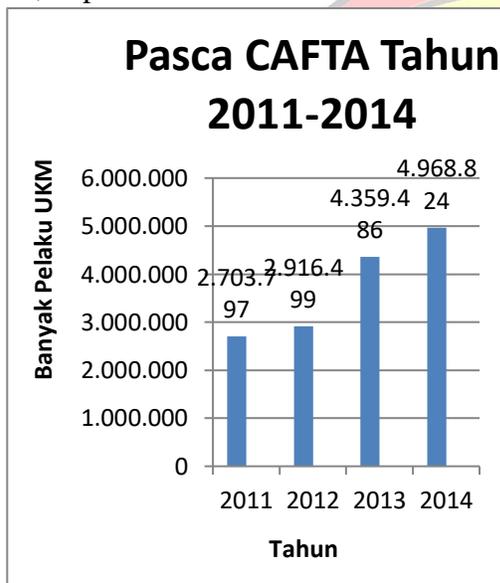
### 4.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berlokasi di Jalan Karya Utama No.4, Perbarakan, Lubuk Pakam-20514.

Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah yang berbatasan dengan Kota Medan mempunyai banyak keuntungan dalam hal pemasaran yang juga di tandai dengan banyaknya pelaku UKM di daerah ini. Perkembangan UKM di Kabupaten Deli Serdang relatif meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari pasca CAFTA (China-ASEAN

Free Trade Agreement)

- Periode 2011 dari 2.703.797 mengalami peningkatan menjadi 2.916.499 pada tahun 2012, atau terjadi peningkatan sejumlah 212.702 atau rata-rata sebesar 7,8 per tahun.
- Periode 2013 dari 4.359.486 mengalami peningkatan menjadi 4.968.824 pada tahun 2014, atau terjadi peningkatan sejumlah 609.338 atau rata-rata sebesar 13,97 per tahun.



• Gambar 4.1 : Pasca CAFTA Tahun 2011-2014

Hal ini disebabkan potensi alam Kabupaten Deli Serdang yang sangat mendukung seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Potensi alam tersebut digunakan sebagai bahan baku industri rumah tangga yang dihasilkan oleh UKM di daerah ini.

#### 4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang

Tugas pokok adalah tugas yang paling utama dari sebuah jabatan atau organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup jabatan atau organisasi tersebut.

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi juga merupakan sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang di bebankan kepada organisasi untuk mencapai dan dilakukan. Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.

#### 1.1.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang

##### a) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (Lima) tahun yang berisi sesuatu yang ideal, mengandung nilai-nilai yang luhur dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Tujuan berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja perusahaan.

Adapun tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKMKabupaten Deli Serdang adalah :

1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan Anggota dan Pelaku koperasi.

2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi serta Pemahaman masyarakat tentang Perkoperasian.
3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan usaha mikro, kecil dan Menengah.
4. Meningkatkan kewirausahaan dan keunggulan Bersaing Usaha Kecil dan Menengah.
5. Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Adminisrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

**b) Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Sasaran bersifat spesifik dapat dinilai, terukur dan berorientasi pada hasil sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. Adapun sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan anggota dan pelaku koperasi.
2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi serta Pemahaman masyarakat tentang Perkoperasian.
3. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Meningkatnya kewirausahaan dan keunggulan Bersaing Usaha kecil Menengah

5. Berkembangnya sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
6. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik

**1.1.5 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang**

Strategi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari Renstra (Rencana Strategi) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang, Renstra tersebut berisikan hal-hal dasar untuk membina dan mengembangkan Koperasi dan UKM. Berikut disajikan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang :

1. Memberdayakan kelembagaan dan usaha koperasi dengan bertumpu pada kepentingan ekonomi anggota dan masyarakat

Strategi :

- a. Pengembangan sektor koperasi berbasis ekonomi kerakyatan.
- b. Mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi.
- c. Penanganan koperasi tidak aktif.
- d. Peningkatan kualitas koperasi.
- e. Sosialisasi tentang perkoperasi kepada masyarakat.

Kebijakan :

- a. Peningkatan pembinaan dan fasilitas koperasi.
- b. Fasilitas pelayanan pendirian koperasi.
- c. Pembinaan koperasi.
- d. Pengawasan koperasi.
- e. Penilaian kesehatan koperasi.

- f. Peningkatan koperasi.
  - g. Penyehatan koperasi.
  - h. Pengembangan gerakan masyarakat sadar koperasi.
2. Memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah sebagai pelaku dalam sistem ekonomi produktif

Strategi :

- a. Pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah berbasis ekonomi kerakyatan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola UMKM.
- c. Peningkatan jaringan pemasaran dan distribusi produk UMKM.
- d. Peningkatan permodalan UMKM.
- e. Peningkatan pelayanan legalisasi UMKM.

Kebijakan :

- a. Peningkatan pembinaan dan fasilitas usaha mikro, kecil dan menengah.
  - b. Peningkatan keahlian/keterampilan pengelola UMKM.
  - c. Meningkatkan akses pemasaran dan promosi dengan pelaku-pelaku usaha besar.
  - d. Fasilitas akses permodalan UMKM kepada lembaga keuangan
  - e. Fasilitas akses legalitas formal.
3. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas SDM Aparatur.
- b. Kerja dan kinerja Aparatur.

Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
- b. Implementasi peraturan disiplin aparatur.
- c. Pelaksanaan standar pelayanan minimum.

## 1.2 Pelaksanaan Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang dalam membina usaha kecil dan menengah (UKM) dengan cara mengadakan pelatihan mengenai perkembangan UKM secara langsung. Pelatihan secara langsung dimaksud untuk meningkatkan skill (kemampuan) pelaku usaha supaya dapat menghasilkan produktivitas secara efektif dan efisien. Pelatihan tersebut bisa dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang ataupun Kementerian langsung, tergantung apa yang dibutuhkan oleh daerah dalam menunjang kesejahteraan UKM. Contoh pelatihan itu sendiri seperti mengadakan seminar mengenai kewirausahaan dengan maksud memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai berwirausaha dan mengontrol UKM baik dari internal maupun eksternal untuk mengetahui perkembangan UKM tersebut. Pada dasarnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM memberikan fasilitas atau sebagai perantara program untuk mengembangkan UKM di setiap daerah. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya dan mampu memperbaiki sumber daya manusia secara langsung dengan mengikuti program dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang.

Jenis – jenis pelatihan yang diberikan Dinas Koperasi kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

- Pelatihan koperasi jasa keuangan yang berbasis kompetensi.

- Pelatihan pembukuan sederhana bagi pengelola UMKM.
- Pendidikan dan pelatihan teknisi HP (HandPhone) bagi pengusaha Mikro.
- Pelatihan manajemen perkoperasian.
- Pelatihan Standart Kompetensi SAK-ETAP (Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).
- Pelatihan Digital Printing (Sablon).

Pelatihan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang telah berkoordinasi dengan Pemerintahan Provinsi, meliputi : bidang perizinan, pembiayaan, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi serta menyusun skala prioritas dalam menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. Dalam pelaksanaan penumbuhan jiwa kewirausahaan, Dinas melakukan kerjasama dengan Instansi terkait seperti : Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

Pelatihan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada masing-masing bidang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah agar menjadi usaha yang lebih tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk menentukan keberhasilan program pembinaan dilapangan.

#### **4.3 Faktor pendukung yang dihadapi Dinas Koperasi dalam upaya mengembangkan UKM di Kabupaten Deli Serdang.**

Adapun faktor pendukung yang dihadapi Dinas Koperasi dalam upaya mengembangkan UKM di Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut : Adanya dukungan dari perbankan kepada UKM terkait pemberian modal bagi

pelaku UKM yang sangat membantu dalam meningkatkan usahanya.

Fasilitas dukungan yang diberikan oleh perbankan melalui mekanisme pemberian kredit dengan bunga yang rendah akan sangat membantu pelaku UKM dalam meningkatkan skala usaha menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Selain itu dengan dukungan tersebut membuat produk UKM akan semakin terbuka, sehingga kualitas dan kuantitas yang dihasilkan akan menjadi lebih baik karena adanya penambahan modal untuk kegiatan produksi dari pemberian kredit oleh perbankan.

Adapun beberapa keunggulan dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

1. Dilihat dari sisi permodalan, pengembangan usaha kecil memerlukan modal usaha yang relatif kecil dan juga teknologi yang digunakan tidak perlu teknologi tinggi sehingga pendiriannya relatif mudah dibanding usaha besar.
2. Motivasi usaha kecil akan lebih besar, jika berfokus pada usaha tersebut. Seseorang dengan motivasi yang tinggi dan terdapat ikatan emosional yang kuat tentu akan lebih berhasil dalam menjalankan usahanya serta akan menambah kekuatan para pengusaha kecil dalam persaingan.
3. Memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan dengan pola permintaan pasar, bahkan sanggup melayani selera perorangan. Perusahaan kecil produknya bervariasi sehingga akan memudahkan untuk menyesuaikan keinginan konsumen.
4. Perdagangan bebas telah memberikan peluang kepada pengusaha di dalam negeri untuk dapat menjual produknya ke luar negeri. Dengan dibukanya perdagangan bebas maka tidak ada lagi penghambat untuk mask ke dalam suatu negara.

#### **Faktor penghambat yang dihadapi Dinas**

### **Koperasi dalam upaya mengembangkan UKM di Kabupaten Deli Serdang.**

Adapun Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Koperasi dalam upaya mengembangkan UKM di Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut ;

1. Keterlambatan dalam penyediaan anggaran menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan dukungan bagi pelaku UKM.  
Hal tersebut akan berdampak pada daya serap anggaran dan target realisasi kegiatan yang kurang maksimal dan secara tidak langsung akan menyebabkan penurunan kinerja Dinas Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Dukungan dari stakeholder akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan SDM bagi pelaku UKM di Kabupaten Deli Serdang yang akan berdampak pada pelaksanaan penyuluhan pendidikan dan pelatihan usaha menjadi kurang optimal.
3. Belum optimalnya pendataan mengenai UKM yang ada di Kabupaten Deli Serdang, karena masih banyak pelaku UKM yang takut jika di daftarkan sebagai anggota pembinaan Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pemerintahan lainnya maka usaha mereka akan terkena pajak sehingga mengurangi pendapatan mereka.
4. Sebagai pelaku UKM rendah nya keterampilan teknis dari para pekerja berakibat pada sulitnya standarisasi produk. Begitu juga penggunaan teknologi produksi yang sederhana mengakibatkan mutu produk yang dihasilkan bervariasi. Apabila hal ini terjadi, maka produk yang dikirim kemungkinan akan di klaim oleh konsumen. Hal ini akan merugikan,

apalagi jika produk ditolak oleh konsumen luar negeri.

5. Lemah dalam administrasi keuangan, kondisi ini seringkali menjadi penyebab sulitnya perusahaan mengajukan kredit ke pihak ketiga, sebab para investor baru mau menanamkan uangnya kalau terjamin keamanannya, artinya uang yang ditanamkannya dijamin akan kembali dan sekaligus memperoleh keuntungan. Lemahnya administrasi keuangan mengakibatkan sulitnya melakukan penilaian kelayakan.  
Banyak biaya di luar pengendalian terkait dengan lemahnya administrasi keuangan yang sering kali dijumpai tidak terdapatnya pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi.
6. Kesulitan memperoleh izin usaha, birokrasi yang harus ditempuh UKM dalam mengurus perizinan seringkali cukup panjang sehingga menyebabkan lamanya waktu yang diperlukan untuk sampai memperoleh perizinan. Dalam usaha kesempatan yang diperoleh tidak setiap saat, bahkan datangnya mungkin dalam waktu yang terbatas.
7. Belum adanya/kurangnya perlindungan terhadap usaha kecil. Sesuatu yang lemah mestinya dilindungi dari ancaman yang kuat. Karena tidak adanya perlindungan hukum, seringkali usaha kecil terpojok dengan usaha besar. Banyak perusahaan kecil gulung tikar karena terjunnya usaha besar ke bidang usaha yang dilakukan perusahaan kecil.

### **4.4 Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Deli Serdang**

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang kini sudah cukup baik, itu semua dapat dilihat dilihat dari makin banyaknya anggota usaha kecil dan menengah yang menjadi pembinaan Dinas

Koperasi dan UKM, ada banyak pelaku UKM yang dibina atau di berdayakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Deli Serdang, berikut beberapa UKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Deli Serdang :

Setiap usaha tentu memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari para pelaku usaha. Perbedaan karakteristik ini tentunya memunculkan pola kebutuhan yang berbeda pula. Misalnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pengusaha teknisi HP, para pelaku tersebut langsung mengaplikasikan dari yang didapat dalam masa pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. Dapat dikatakan jika pembinaan tersebut mampu mengubah dan dapat meningkatkan produktivitas usaha, sehingga kemungkinan besar mereka dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri dan dapat mengurangi angka pengangguran. Dan jika pengangguran dapat ditekan maka tidak menuntut kemungkinan bahwa pembinaan tersebut sudah dikatakan berhasil. Keberhasilan program pembinaan akan banyak ditemukan oleh tingkat kesesuaian program yang diberikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Kerjasama yang saling menguntungkan ini akan mengasihkan hak dan kewajiban masing-masing dengan rasa senang hati tanpa merasa terpaksa dan di rugikan.

Keberhasilan UKM itu bisa dilihat dari 4 faktor

#### 1. Kepemimpinan

Kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pemimpin yang akan menggerakkan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin perlu menegakkan kedisiplinan dalam suatu organisasi, karena itu sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan kepada anggota dalam menciptakan tata tertib

yang baik.

#### 2. Manajerial

Manajerial adalah perpaduan antara seni dan ilmu, sebuah ilmu dalam mengatur segala sesuatunya dengan benar. Disini seorang manajer haruslah menguasai ilmu manajerial dengan baik seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi serta pengendalian atau pengawasan.

#### 3. Produktivitas

Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya yang diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau UKM yang menghasilkan barang atau jasa.

#### 4. Pemasaran

Pemasaran adalah analisis, perencanaan, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sebagai sasarannya untuk mencapai tujuan usaha.

Jika keempat komponen tersebut sudah ada dan bekerja dengan optimal maka keberhasilan UKM dalam mengembangkan usahanya cukup terbuka lebar.

### KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai Peranan Dinas Koperasi Terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Pada Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi terhadap pelaku UKM memberikan dampak yang baik. Hal ini membuktikan bahwa setiap pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM mendapat respon yang baik dari para pelaku usaha, semua itu

untuk meningkatkan UKM baik dari sisi Internalnya ataupun Eksternalnya

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Koperasi dalam upaya mengembangkan UKM di Kabupaten Deli Serdang.

- a. Faktor pendukung

Dukungan dari perbankan kepada UKM terkait pemberian modal bagi pelaku UKM di Kabupaten Deli Serdang sangat baik karena membantu pelaku UKM dalam meningkatkan usahanya.

- b. Faktor penghambat

- Keterlambatan dalam penyediaan anggaran untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan dukungan bagi pelaku UKM.
- Masih belum optimalnya pendataan UKM yang ada di Kabupaten Deli Serdang dikarenakan masih banyak yang beranggapan jika usahanya di daftarkan ke Dinas Koperasi dan UKM atau pun lembaga lainnya akan dikenai pajak sehingga akan mengurangi pendapatan mereka.

3. Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Deli Serdang

- a. Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) kini mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa banyak pelaku usaha yang ingin mengikuti pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM guna membuat usaha kecil dan

menengah tersebut lebih berkembang lagi.

- b. Kesejahteraan yang diharapkan oleh setiap orang tidak bisa dirasakan secara langsung atau dengan kata lain pembinaan Dinas Koperasi dan UKM tidak secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan dan keberhasilan UKM akan dapat dirasakan, jika UKM mampu mengoptimalkan semua bantuan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang.

## 5.2 Saran

Dari hasil pembahasan diatas maka penulis akan memberikan saran dan masukan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten deli Serdang sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan tenaga pegawai bagi Dinas Koperasi dan UKM agar dalam melakukan kegiatan pelayanan, penyuluhan, pendidikan dan juga pelatihan terhadap pelaku UKM agar lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai penelitian secara menyeluruh mengenai pengembangan UKM khususnya di Kabupaten Deli Serdang untuk menciptakan produk UKM yang berkualitas dan berdaya saing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Akifa, P. Nayla. 2014. *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Jogjakarta : Laksana
- Soeprihanto, J. 2001. *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta :

BPFE

ambil dari :

Veithzal, Rivai. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

<[http://www.Struktur\\_Organisasi\\_dan\\_Kepegawaian\\_Gambaran\\_Usaha\\_Mikro\\_Kecil\\_Dan\\_Menengah\\_UMKMDI\\_123\\_dok\\_documento.pdf](http://www.Struktur_Organisasi_dan_Kepegawaian_Gambaran_Usaha_Mikro_Kecil_Dan_Menengah_UMKMDI_123_dok_documento.pdf)> [di unduh 28 Juli 2018 pukul 12:09]

Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan XVIII*. Jakarta : Bumi Aksara

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah [ Internet ] di ambil

Hamalik,Oemar. 2007. *Pengembangan SDM, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu*. Jakarta : Bumi Aksara

dari:<<https://www.slideshare.net/antonkurniawan/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm>>[diunduh 27 Juli 2018 Pukul 20:45]

**Dokumen – dokumen**

Moekijat. 1991. *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Cetakan 4*. Bandung : Mandar Maju

Provinsi Sumatera Utara Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta

Kebijakan Pembinaan Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang

Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2016

Suhardono. 1994. *Peran Kepemimpinan Lembaga Daerah*. Bandung : Fokus Media

Musanef. 1991. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju

Hidayat, S.1979. *pembinaan perkotaan di Indonesia*. Bandung : Bina Aksara

Tohar, M. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta : Kanisus

**Sumber lainnya :**

**Sumber Internet**

Struktur Organisasi Kepegawaian[ Internet ] di